

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya. Penelitian terdahulu yang selaras bermanfaat untuk mengelola atau menemukan pemecahan masalah yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Meminimalkan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Pada penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dibaca oleh peneliti lokus dan fokus permasalahan tidak sama persis namun dapat sangat membantu peneliti dalam menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini.

Peneliti memilih empat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan, yaitu penelitian dari :

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis

1.	Firda Awaliah (2021)	Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kota Serang	Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (2011)	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif
2.	Dwi Heru Sukoco (2020)	Efektivitas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “SABILULUNGAN” Kabupaten Bandung	Teori Efektivitas Kebijakan Mile Dan Huberman (2017)	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif
3.	Atik Rumana (2016)	Efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dalam Penanganan Keluhan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru	Teori Efektivitas Richard dan M.Steers (1985:46)	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif
4.	Astrid Cyntia Priesteta (2019)	Mengintegrasikan Pelayanan Sosial Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di	Teori Pelayanan Kemmis dan McTaggart (2007)	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif

		Kelurahan Dago Kota Bandung.				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Peneliti

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti menyajikan hasil penelitian dari setiap sumber yang bertujuan sebagai bahan penelitian serta menjadi arah yang akan ditempuh peneliti dalam penelitian. Berikut hasil penelitian terdahulu :

1. Penelitian Terdahulu Firda Awaliah (2021)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kota Serang, maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas sosial dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan belum mencapai tujuan secara optimal, hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum mendukung, koordinasi masih lemah, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program masih terbatas yang dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III sebagai panduan dalam meneliti Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

2. Penelitian Terdahulu Dwi Heru Sukoco (2020)

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas yang dianalisis menggunakan teori Mile dan Huberman (2017) hasilnya masih belum memuaskan karena bisa disimpulkan mulai dari peran dalam menetapkan program efektivitasnya sesuai dengan rencana atau sesuai dengan SOP, dalam melaksanakan efektivitasnya masih belum sepenuhnya terlaksanakan dengan sesuai target. Dan melaksanakan tindakan sejauh ini masih memakai system penilaian masyarakat dan dalam hambatan-hambatan memakai laporan dan selalu terkoordinir.

3. Penelitian Terdahulu Atik Rumana (2016)

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas studi deskriptif kemiskinan di kota bandung, yang dianalisis menggunakan teori Richard dan M.Steers (1985:46) yang meliputi kemampuan diri, perstasi kerja, kepuasan kerja, kualitas, penilaian oleh pihak luar. Dari teori itu masih belum bisa efektif dalam menjalankan studi deskiprif dan masih belum optimal.

4. Penelitian Terdahulu Astrid Cyntia Priesteta (2019)

Berdasarkan hasil penelitian Mengintegrasikan Pelayanan Sosial Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Kelurahan Dago Kota Bandung, yang di analisis menggunakan teori Kemmis dan McTaggart (2007) yang meliputi prestasi, kedisiplinan, kreativitas, bekerjasama, kecakapan, tanggung jawab. Dari teori itu sejauh ini masih belum sepenuhnya berjalan efektif terutama dalam melayani masyarakat fakir miskin.

2.1.2 Kajian Administrasi Publik

2.1.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari Bahasa Latin yang terdiri dari *ad* + *ministrare*, yang secara operasional berarti melayani, membantu dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *administration* dan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. (Hadari, 1994). Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).
- 2) Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris), yaitu:
 - a. Menurut H. A. Simon mengemukakan bahwa "*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*" (administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama)

- b. Menurut Luther Gulick mengemukakan bahwa “*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*” (administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan)
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai:
- Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
 - Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.
 - Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
 - Kegiatan kantor dan tata usaha.

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut Kasim (1994: 8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23). Sedangkan Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Administrasi publik juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses.oleh sebab itu,sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak di pahami. pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai adminstrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik.

Sedangkan Administrasi Negara menurut Waldo (1983:9) mendefinisikan:

“Administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.”

Jadi berdasarkan teori di atas administrasi publik merupakan seni dan ilmu organisasi dan manajemen dan manusia untuk mengatur urusan-urusan Negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun peran administrasi publik, Menurut Grey (1989:15-16) yang dikutip oleh Harbani Pasolog dalam bukunya “Teori Administrasi Publik”, (2017:20) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- 1) Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
- 2) Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
- 3) Melestraskan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntunan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Pokok dari Administrasi

1. Sekelompok orang, menyiratkan bahwa kegiatan administrasi hanya dapat terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu individu.
2. Kerjasama, menyiratkan kegiatan administrasi hanya dapat dilakukan jika dua individu bekerja sama.

3. Pembagian tugas; menyiratkan kegiatan administrasi tidak hanya sekedar kegiatan kerjasama, melainkan kerjasama harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses; menyiratkan kegiatan administrasi terjadi pada tahapan secara berkesinambungan .
5. Tujuan; menyiratkan sesuatu yang ingin dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ditarik ciri pokok administrasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Sebagai manusia yang tidak bisa berkerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Administrasi

Dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses administrasi akan pincang. Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
2. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas kerja, hubungan ini meliputi :
 - a. Perencanaan
 - b. Pembuatan Keputusan
 - c. Pembimbingan

- d. Pengoordinasian
 - e. Pengawasan
 - f. Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
3. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
 4. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan.
 5. Tata Usaha, yaitu penghimpun, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.

2.1.2.4 Fungsi Administrasi

Newman, menyebut “The Work of Administration” yang dapat dibagi dalam 5 proses, yaitu:

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Pengumpulan Sumber (Assembling Resources)
4. Pengendalian Kerja (Supervising)
5. Pengawasan (Controlling)

2.1.2.5 Dimensi Unsur-Unsur Administrasi

1. Adanya tujuan yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.

2. Adanya partisipasi baik berupa perkumpulan individu atau kantori pemerintahan dan instansi swasta.
3. Adanya target yang digunakan oleh suatu kelompok dalam melakukan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo yang dikutip oleh Ulbert Silalahi dalam bukunya “Studi tentang Ilmu Administrasi” (2016:26) peran administrasi juga menimbulkan:

1. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, kehidupan di berbagai bidang sedang disesuaikan dengan pola hidup yang bertumpu pada kerja sama keorganisasian.
2. Mengatur kehidupan dengan cara yang konsisten dengan contoh kehidupan saat ini dan cara memandang dan bekerja secara objektif.
3. Cara berpikir modern dan bekerja rasional modern dirancang untuk menghasilkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan.
4. Pandangan dan kerja sama ini sejalan dengan ilmu pengetahuan dan inovasi saat ini.
5. Untuk berpikir inovatif dan bekerja dengan bijak hari ini, dan untuk hidup dengan contoh hari ini, untuk mencapai produktivitas dan kelangsungan hidup membutuhkan administrasi.

Dari adanya administrasi publik pasti ada pelayanan untuk melayani publik, pelayanan merupakan bagian dari administrasi, salah satu fungsi dari pemerintahan yaitu melayani publik. Oleh karena itu pemerintah harus membentuk sistem administrasi dan birokrasi. Hal tersebut bertujuan agar

dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Pada dasarnya pelayanan memiliki dua istilah penting, yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (Poerwadaminta 1995 :572).

Maka dari itu pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah. Pelayanan publik diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Pada umumnya masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah atau instansi pemerintahan dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Keberhasilan dari pelayanan publik dapat memberikan citra positif pada instansi pemerintah, dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik pada instansi pemerintah.

Sedangkan Menurut Pasolong (2013 : 128) mengemukakan dalam era globalisasi, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang teribatikan pembangunan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan dari suatu instansi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik

2.1.3 Kajian Kebijakan Publik

2.1.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2011), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik

a. Tahapan-Tahapan Kebijakan

Yeromoas T Ka'ban (2005: 62) mengemukakan bahwa tahapantahapan kebijakan meliputi beberapa tahap penting antara lain penetapan agenda kebijakan yaitu masalah apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, formulasi kebijakan yaitu mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah, adopsi kebijakan yaitu merupakan tahap berikutnya di mana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif melalui suatu proses rekomendasi, implementasi kebijakan adalah suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada dan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

b. Analisis Kebijakan

Yeremias T Ka'ban (2005: 63) mengatakan bahwa proses analisis kebijakan yang dibedakan atas perstruktur atau identifikasi masalah, identifikasi alternatif, selektif alternatif. Pada tahap selektif alternatif meliputi menyepakati kriteria alternatif, penentuan alternatif.

c. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Solichin Abdul Wahab 2008:64) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang baik dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

d. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai langkah untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan yang dilaksanakan diperlukan adanya monitoring. Di dalam proses monitoring ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Tingkat efisiensinya yang berkenaan dalam proses rasio terbaik antara semua biaya yang dikeluarkan selama hasil implementasi dibandingkan dengan hasil sementara yang diperoleh. Sedangkan tingkat efektivitas selalu dikaitkan dengan apakah suatu hasil sementara yang didapat merupakan hasil yang memang direncanakan atau tidak.

Hasil monitoring sebagai bahan mengevaluasi untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar politik.

2.1.3.3 Dimensi-Dimensi Kebijakan Publik

1. Dimensi Manajemen

Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan

publik. Dimensi ini menekankan implementasi berupa penerapan metode, teknik, model, dan teknik implementasi yang memadai.

2. Dimensi Organisasi

Dimensi organisasi berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Aspek pertama yang ditekankan adalah pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab bekerja baik secara horizontal maupun vertikal. Aspek kedua yang tak kalah penting adalah apakah pihak yang mengerjakan tugas tersebut memiliki kompetensi yang memadai dalam mengerjakannya. Dan aspek ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan suatu tugas, dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut.

3. Dimensi Etika

Dimensi etika dianalogikan dengan sistem sensor di dalam administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain, dan sangat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan tujuan organisasi publik pada khususnya.

4. Dimensi Lingkungan

Dimensi atau perubahan dimensi eksternal administrasi publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Pentingnya pengaruh lingkungan tersebut mulai disadari sejak munculnya konsep dan teori tentang ekologi administrasi atau ekologi organisasi, atau sejak teridentifikasinya

konsep “sistem terbuka” oleh F.E. Emery (Robbins, 1991) yang mengakui adanya interaksi antara suatu organisasi dengan lingkungan.

5. Dimensi Kinerja

Kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana seseorang menggunakan otoritas atau kekuasaan dapat dihambat oleh instrument eksternal dan norma-norma internal (Chandler&Plano, 1988:119).

2.1.3.4 Proses Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan public yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi (Putra, 2001).

Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley (1985) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

1. *Agenda setting*
2. *Formulation dan legitimation*

3. *Program Implementations*
4. *Evaluation of implementation, performance, and impacts*
5. *Decisions about the future of the policy and program*

2.1.3.5 Tahap Proses Kebijakan Publik

Starling (1973:13) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yaitu:

1. Identification of needs, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisa data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran
4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.
5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

2.1.4 Kajian Implementasi Kebijakan

2.1.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya Teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan yang dimana di pakai untuk penelitian ini, dan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

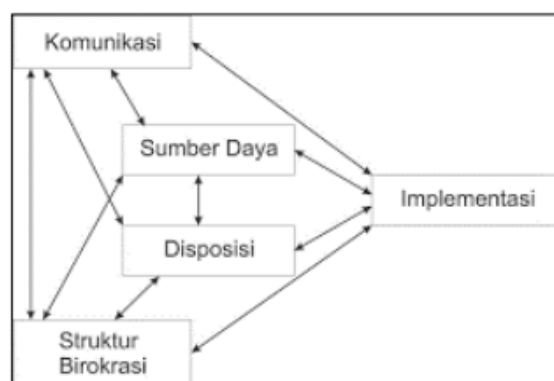
- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, selain itu kebijakan yang

dikomunikasikan pun harus cepat, tepat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model Implementasi Kebijakan Menurut George.C.Edward III, model ini berprespektif *top-down* dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implement*. Menurut George C. Edward III ada empat indikator dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan , yaitu : Komunikasi (Communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Dispositions), dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Keempat indikator diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena satu dengan yang lainnya memiliki kolerasi dan hubungan yang erat. Yang berguna sebagai syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Berikut gambar keempat indikator tersebut :



Gambar 2.1

Model Impementasi George C. Edward III

Sumber : Agustino, 2016

1) Komunikasi

Terdapat tiga elemen yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan indikator komunikasi yaitu :

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau tida ambigu, ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Indikator kedua ini yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Berikut indikator elemen tersebut :

- a) Staff, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan yaitu staff, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencakupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staff yang mencakupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya.

3) Disposisi

Indikator ketiga ini yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah disposisi, indikator tersebut yaitu :

- a) Pengaturan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Indikator ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua elemen indikator struktur birokrasi ini yang dapat mendongkrak kinerja implementasi kebijakan ke arah yang lebih baik :

- a) *Standar Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b) Fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur

birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi 1yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik

Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu penliti untuk menganalisis implementasi kebijakan secara lebih mendalam.

2.1.4.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: unsur pelaksana, adanya program yang akan dilaksanakan, dan target group. (Abdullah, 1988:11; Smith,1977:261).

1. Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (1977:261) menyebutkan istilah “implementing organization”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

2. Program

Di muka telah dikemukakan bahwa, kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program.

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

3. Target Group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau

yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

2.1.5 SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) adalah layanan satu pintu untuk penanggulangan kemiskinan, SLRT mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan warga miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkannya dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah dan non pemerintah di pusat dan daerah.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut adalah dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan warga miskin untuk bisa mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan. Hal itu menyebabkan pada tahun 2016 dicanangkannya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

SLRT dirancang untuk mempercepat keluarga miskin, rentan, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengakses bantuan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pusat dan daerah. SLRT membantu mengidentifikasi kebutuhan keluarga miskin, rentan miskin, dan PMKS, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dan nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu

mengidentifikasi keluhan keluarga miskin, rentan miskin, dan PMKS melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan-keluhan tersebut dengan baik.

SLRT memberikan layanan melalui empat fungsi utama, yaitu: (1) Identifikasi keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan; (2) Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; (3) Integrasi informasi, data, dan layanan; dan (4) Kontribusi terhadap pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin secara dinamis di daerah. Dengan SLRT diharapkan akan terjadi perubahan akses dari “penerima manfaat yang awalnya dihadapkan pada multi-birokrasi akan berubah menjadi cukup datang ke SLRT untuk mengakses multilayanan sosial.”

1. Mengapa Harus SLRT ?

- a. Program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tidak efisien dan efektif
- b. Pada banyak kasus, penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial yang komprehensif
 - a) Fragmentasi horizontal dan vertical
 - b) Cakupan dan pendanaan masih terbatas
 - c) Data statis dan belum adanya standarisasi mekanisme penetapan sasaran
 - d) Penjangkauan terbatas dan penanganan keluhan tersebar.

2. Fungsi Utama SLRT

- a. Integrasi informasi, data dan layanan.

- b. Identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan.
- c. Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program.
- d. Pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal yang penting (Sugiono, 2011).

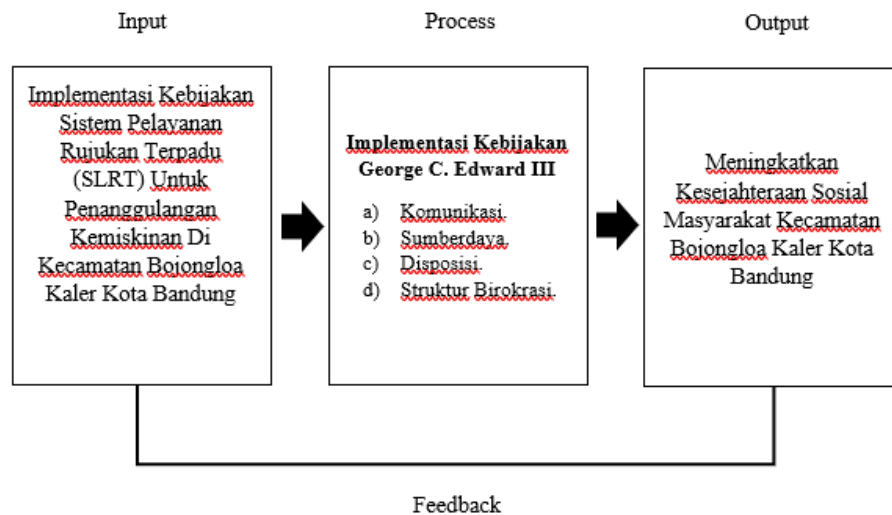
Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Maka, penelitian kali ini penelitian mengambil teori yang akan menjadi kerangka berpikir acuan atau pedoman dari alur penelitian ini. Alur penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Meminimalkan Kemiskinan Di Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Bojongloa Kaler) menggunakan teori George C. Edward III, yang mana berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dengan demikian, Agar dapat mempermudah dalam memahami pokok-pokok pikiran dari teori yang digunakan dalam penelitian, peneliti mencoba menggambarkan kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola-pola pikiran peneliti mengenai implementasi kebijakan SLRT di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung kedalam gambar berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

Sumber : Peneliti

2.1 Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir, berikut ini proposisi mengenai Implementasi Kebijakan SLRT Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung , yang akan berjalan dengan optimal apabila didukung oleh Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dengan 4 dimensi diantaranya : 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya ,

3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi dijadikan acuan untuk menjawab rumusan masalah :

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler.
2. Mengetahui hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler.